KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ide pembentukan Kementerian Pangan,langkah strategis atau bebani APBN
Tanggal : Sabtu, 09 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ide Pembentukan Kementerian Pangan

Langkah Strategis Atau Bebani APBN

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai sambutannya selalu menyinggung mengenai pentingnya ketahanan pangan. Sebab, ketahanan pangan demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

Bahkan, di dalam sidang Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (6/8), kemarin, Prabowo berbicara keras dan tegas mengenai kedaulatan pangan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk menguasai sektor pangan dalam negeri agar bangsa aman. Kata dia, apapun yang terjadi, Indonesia akan aman, jika sektor pangan dikuasai.

"Sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita," katanya.

Jika sektor pangan dikuasai, Prabowo menjamin semua rakyat bisa mendapatkan makanan. Baik setiap hari maupun setiap bulan. "Kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun," katanya.

Menurut Prabowo, bangsa yang merdeka harus bisa memproduksi makanannya sendiri. Ia menyebut tidak ada dalam sejarah manusia, bangsa bisa merdeka jika tak memenuhi pangannya.

"Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia produksi makannya sendiri. Karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis," ungkapnya.

Saat ini, sudah ada beberapa kementerian dan lembaga yang fokus untuk mengurusi pangan. Diantaranya, Kementerian Pertanian, Badan Pengan Nasional (Bapanas), Dewan Ketahanan Pangan dan Perum Bulog.

Keberadaan lembaga ini masih dianggap kurang dalam memenuhi kebutuhan dan produksi pangan di Indonesia. Karenanya, muncul usulan dan gagasan untuk membentuk Kementerian Pangan. Tujuannya untuk merealisasikan target dan keinginan Presiden Prabowo.

Usulan itu datang dari anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. Kata dia, pembentukan Kementerian Pangan sangat baik untuk menjaga kedaulatan Indonesia. "Pembentukan Kementerian Pangan dapat menjadi langkah yang strategis," ujar Firman.

Pertanyaannya, apakah memang Kementerian Pangan itu penting untuk dibentuk? Misbah Hasan, sebagai Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Kementerian Pangan belum penting dibentuk. "Nanti justru menambah beban anggaran pemerintah," tolaknya.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Misbah Hasan dan Firman Soebagyo mengenai Kementerian Pangan. Berikut wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR

Kehadiran Kementerian Pangan Langkah Strategis

> Ide pembentukan Kementerian Pangan dapat fokus pada pengembangan hilirisasi pangan, sehingga meningkatkan nilai tambah produk pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

Anda mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Pangan?

Saya kita wacana ide untuk membentuk Kementerian Pangan itu bagus. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembentukan Kementerian Pangan dapat menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan pengelolaan pangan di Indonesia.

Bisa Anda jelaskan Kementerian Pangan yang dimaksud?

Kementerian Pangan menggabungkan Bulog dengan Bapanas.

Kenapa Anda mengusulkan adanya Kementerian Pangan?

Dengan menggabungkan beberapa lembaga, koordinasi antara kebijakan dan implementasi dapat menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan efektivitas dalam mengelola stabilitas harga dan distribusi pangan. Disamping itu, menggabungkan beberapa lembaga dapat memangkas birokrasi yang panjang dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Apakah Anda yakin Kementerian Pangan akan mengatasi masalah pangan?

Ide pembentukan Kementerian Pangan dapat fokus pada pengembangan hilirisasi pangan, sehingga meningkatkan nilai tambah produk pangan dan meningkatkan pendapatan petani. Kementerian Pangan dapat mempromosikan inovasi dan substitusi pangan, sehingga meningkatkan diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Tetapi, dengan adanya Kementerian Pangan akan membuat tumpang tindih dengan kementerian lain?

Memang perlu dipertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil langkah jika memang ide pembentukan Kementerian Pangan. ■ REN

MISBAH HASAN, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)

Belum Penting, Bisa Menambah Beban APBN

> Lebih baik mengoptimalkan kinerja Ditjen Tanaman Pangan di Kementan, dengan menambah jumlah anggaran untuk program dan kegiatan yang menyasar kepada petani kecil, perempuan petani, dan masyarakat adat.

Ada usulan agar pemerintah membentuk Kementerian Pangan agar permasalahan pangan di Indonesia bisa swasembada. Bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya, Kementerian Pangan tidak perlu dibentuk tersendiri.

Kenapa?

Karena akan semakin menambah dan membebani APBN. Setidaknya untuk membiayai belanja pegawai dan operasional birokrasi di kementerian.

Kalau dibentuk Kementerian Pangan tersendiri, apakah nantinya akan tumpang tindih dengan Kementerian Pertanian?

Iya, karena masalah pangan itu bagian dari Kementan. Jika Kementerian Pangan dibentuk, maka akan terjadi overlap kebijakan.

Lalu, apa pendapat Anda?

Lebih baik mengoptimalkan kinerja Ditjen Tanaman Pangan di Kementan, dengan menambah jumlah anggaran untuk program dan kegiatan yang menyasar kepada petani kecil, perempuan petani, dan masyarakat adat.

Hanya itu?

Koordinasi antara Ditjen Tanaman Pangan Kementan dengan Ditjen Pangan dan Pertanian Bappenas serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu juga harus dimaksimalkan.

Terkait masalah pangan yang sampai saat ini masih menjadi permasalah di Indonesia. Apa catatan Anda?

Program-program seperti food estate yang tidak terlalu berdampak pada masyarakat atau petani kecil tradisional juga musti dievaluasi secara menyeluruh, karena justru menimbulkan kerentanan masyarakat dan deforestasi. ■ REN